

BAB III

Kekerasan, Maskulinitas dan Negara

Kekerasan dan Maskulinitas

“You have to be willing to fight so that actually don’t have to...If you don’t protect your turf, if you don’t control it, if you’re not the boss, then you will lose it. There is another brother ready to take it. You need to eliminate problems, before you get hurt.”

(Isaac, 35 years old black man (in Mansley 2009: 7)

“Violence is like a shotgun. It is easiest way to get what I want.”

(Marc, 44 years old white man) (in Mansley 2009: 97)

“Fighting was a release. Before I fought, I was the most nerveous person in the world, but afterward because I would win , then I would feel a lot better.”

(Christian, 33 years old white man) (in Mansley 2009: 66)

Kekerasan bagi laki-laki adalah salah satu cara yang harus dilakukan untuk menunjukkan kuasa serta menjaga maskulinitas mereka. Saya meminjam apa yang telah ditemukan oleh Elizabeth A. Mansley (2009). Ia meneliti kekerasan dalam konteks ras, kelas sosial, ekonomi dan politik serta hubungannya dengan maskulinitas yang terjadi pada kelompok laki-laki baik itu laki-laki berkulit hitam, kulit putih atau kulit berwarna di daratan Amerika. Dari penelitiannya tersebut Mansley menyimpulkan, bahwa bagi laki-laki, kekerasan menjadi cara paling mangkus, cara paling jitu dalam menyelesaikan persoalan. Tidak peduli apakah laki-laki tersebut seorang *negro* (kulit hitam), *gringo* (kulit

putih), atau para laki-laki *mulato* atau *chino* (kulit campuran ras Afrika-Amerika, Asia-Amerika), mereka akan punya cara yang sama ketika menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi, yakni dengan menggunakan kekerasan. Kekerasan lantas menjadi tindakan yang bersifat preventif. Artinya kekerasan digunakan laki-laki—baik individu maupun kelompok, sebagai tindakan ‘pencegahan’ yang harus selekas mungkin dilakukan sebelum masing-masing individu atau kelompok *keduluan* oleh pihak lain. Para laki-laki lantas seperti merasa dituntut untuk menjadi sosok yang pertama, *The First*, dalam hal tindak kekerasan. Mereka terdorong melakukan hal tersebut agar maskulinitas mereka terjaga, tidak jatuh dan dijabal oleh pihak lain. Di jalanan, seorang laki-laki harus mempertahankan maskulinitas mereka dari rongrongan laki-laki lain. Sementara di rumah, mereka mempertahankannya agar tidak jatuh dan direbut oleh istri atau perempuan atau anak-anak mereka dalam sebuah keluarga.

Apakah ini berarti maskulinitas akan terus hadir lewat kekerasan? Apakah kekerasan memang tidak bisa dipisahkan dari maskulinitas? Atau jika bisa, bagaimanakah caranya? Sementara di sisi lain, kekerasan yang menempel pada maskulinitas ini tidak hadir begitu saja. Lewat kultur patriarki, kekerasan-maskulin ini telah ada berabad-abad lampau sebagai sesuatu yang kita bentuk. Dan sampai kini, keberadaannya cenderung kita rayakan, kita rawat justru dengan cara mengagung-agungkannya.

Dalam wilayah media, lama sudah kita disuguhi ikon-ikon kekerasan-maskulin. Baik lewat medium berupa dongeng lisan yang dikisahkan turun temurun, baik itu fakta maupun fiksi. Seiring gerak peradaban dan hadirnya teknologi, dongeng-dongeng, mitos-mitos itu lantas bertransformasi lewat

bermacam medium. Lewat media cetak misal ada cerita fiksi dan komik. Lewat media elektronik mitos-mitos itu hadir dalam film, telenovela, opera sabun, sinetron, juga tayangan iklan. Ikon-ikon itu hadir dalam bentuknya sebagai sosok *hero*, pahlawan, atau sosok-sosok yang dirasa mampu memenangi kompetisi. Sayangnya kemudian, untuk menjadi seorang pahlawan, pemenang kompetisi, seorang *hero* haruslah mempunyai lawan yang harus dikalahkan, musuh yang harus dibasmi, dan arena perang yang harus dimenangi. Dengan kata lain, menjadi pemenang sama artinya menjadi penguasa.

Tidak ada tempat di dunia ini yang tidak memiliki sosok pahlawannya. Tiap-tiap negara di dunia memiliki ikon-ikon maskulin mereka sendiri. Amerika memberi kita ikon produk maskulinnya, yakni para laki-laki *CowBoy*. Film dan fiksi berkisah tentang betapa hebat menjadi sosok lelaki berkuda dengan bedil di tangan dan topi lebar di kepala tak pernah berhenti diproduksi. Dari *Walker Texas Rangers* atau *No Country for Old Men* (Mc Arthy, 2005), mengambil beberapa contoh saja film dan teks fiksi yang di dalamnya menyuguhkan sosok laki-laki yang harus hidup dengan kekerasan dalam wilayah yang maskulin. Baku hantam, tembak-tembakan, saling bunuh adalah lingkaran wilayah yang tak bisa mereka hindari. Laki-laki harus lekas-lekas mengeluarkan pistol mereka dari sarung, menembakkan pelor ke jidat atau dada laki-laki lain agar tak jadi pecundang. Bagi seorang koboi, selain sesama penjaga satu peternakan, setiap laki-laki lain adalah musuh.

Tak mengherankan, seperti yang dicatat oleh Jacqueline M. Moore (dalam John H. Arnold 2011: 349-469) jika kemudian generasi Amerika kemudian tumbuh dengan membawa jargon “cowboyed up”. Generasi yang percaya bahwa

menjadi laki-laki harus seperti apa yang selama ini menjadi karakter seorang koboi. Berani, superior, pamer kuasa, berani ambil resiko, nekat, atau jika menggunakan kalimat Moore untuk menggambarkan maskulinitas yang menjadi ritus para koboi yakni “*drinking, gambling, fighting*” sebagai prasyarat menjadi seorang “laki-laki”. Pengaruh dari alkohol mereka percaya akan membuat orang jadi ‘bernyali’. Nyali inilah yang dikejar oleh para bujang Amerika, dengan mengapuskan lebih dulu rasa sadar pikiran. Dengan kehilangan rasa sadar, mereka juga kehilangan rasa takut untuk melakukan hal-hal yang sekiranya mereka inginkan namun memiliki risiko besar. Sementara berjudi bagi mereka adalah arena dimana orang-orang membuktikan diri bahwa mereka berani mempertaruhkan apapun demi kemenangan. Tradisi bertaruh dalam perjudian ini, jika di era kontemporer sekarang, dipindahkan, dari kedai-kedai tuak ke kasino-kasino prestisius dan Bursa Saham. Dan yang terakhir, seperti seorang koboi, cuma dengan bertarung, cara yang akan membuktikan/menandai wilayah kekuasaan seseorang, mereka menganggap, menguasai teritori tertentu penting maknanya bagi keberadaan seseorang. Itulah kenapa generasi Amerika membebek cara-cara koboi untuk memberikan identitas bagi kemaskulinitasan mereka.

Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya. Peribahasa tersebut barangkali tepat untuk menggambarkan bahwa tiap-tiap bangsa, tiap-tiap negara memiliki varian ikon *heronya* sendiri-sendiri.

Jika Amerika memiliki koboi, Tiongkok memiliki para pendekar kungfunya sebagai bagian dari representasi lambang energi *wu* yang kontras dengan *wen* (Kam Louie, 2003). *Wu* dan *wen* hadir dari kerangka dikotomi *yin-*

yang (feminin-maskulin), yang menjadi paradigma utama masyarakat Tiongkok dalam pembagian seksualitas perempuan dan laki-laki. Perlu dicatat terlebih dahulu, bahwa *wu-wen* bukanlah analogi untuk menggantikan, atau mewakili keseluruhan paradigma *yin-yang*. *Wu-wen* digunakan untuk mendeskripsikan sisi dikotomi maskulin-nya saja. Meskipun digunakan untuk mendeskripsikan pembagian seksualitas-maskulin, ada perbedaan mencolok di antara *wu* dan *wen*. *Wu* adalah lambang dari energi/hasrat/emosi bersifat *martial*, sementara *wen* mewakili energi maskulin bersifat *literal*. *Wu* Termanifestasikan pada sosok heroik-macho seperti para petarung dan tentara. Sementara energi *wen* melekat pada sosok-sosok seperti para pemikir/intelektual kerajaan, pembuat kaligrafi dan para penyair. Memang di era-era dimana dinasti-dinasti kekaisaran Tiongkok masih ada, posisi maskulin *wu* dan *wen* mendapatkan tempat yang sama tingginya. Artinya, menjadi seorang penyair di masa itu dianggap tidak kurang maskulin-nya dengan menjadi seorang tentara. Namun dalam perkembangan yang terjadi sekarang, posisi *wu* cenderung mendominasi sebagai maskulinitas ideal yang perlu diraih tiap orang. Akan mudah kiranya kita menemukan ikon-ikon energi *wu* yang hadir di media. Seperti Bruce Lee yang menggasak musuh-musuhnya dengan tendangan seribu bayangan. Atau sosok Chinmi di komik *Kungfu Boy* yang mampu menjatuhkan kepungan musuh dengan ‘jurus peremuk tulang’. Dari Yoko sang Pendekar Rajawali sampai Kera Sakti, dari Mulan sampai seekor panda yang jago bergelut dalam film animasi. Tipikal macho yang ada dalam *wu* seolah ingin meyakinkan kepada kita, bahwa cara itulah yang harus ditempuh untuk jadi seorang laki-laki, untuk jadi seorang pemenang. Akan sulit kita percayai, seorang penyair—manifestasi *wen*, yang bermodal kata-kata akan

keluar sebagai pemenang dari gelanggang perang yang terlanjur dipenuhi kekerasan ini.

Masih banyak lagi tentunya ikon-ikon yang hadir untuk menguatkan posisi kekerasan-maskulin. Seperti Karibia memiliki kisah para laki-laki bajak laut dan Italia dengan gangster dan *mafioso*-nya. Atau Jepang yang akan dikenal khalayak dengan ikon maskulin mereka dalam kisah para Samurai dengan jalan hidup *bushido*-nya. (Miyazaki dalam Arnold 2011: 370-387)

Bagaimana di Indonesia? Bagaimana kekerasan dan maskulinitas dimaknai oleh para lelaki “pribumi”? Maskulinitas dalam budaya Indonesia dipahami oleh khalayak sebagai “kejantanan” (Clark, 2010). Membicarakan kejantanan dalam konstruksi budaya di Indonesia dalam hal ini tak bisa lepas juga dari kondisi sosiokultural di Indonesia yang cenderung Jawa-sentris (Pam Nilan dkk, 2014). Kejantanan, jika kita merunut dalam perbincangan seks dan gender di Indonesia, tak bisa lepas dari pandangan masyarakat pribumi yang beranggapan bahwa menjadi laki-laki atau menjadi perempuan adalah kodrat dari Tuhan/Gusti/Alam semesta. (Blackburn 2004: 11; Wieringa 2002:33) Termasuk juga sifat gender yang melekatinya, bukanlah hasil dari konstruksi sosial seperti yang sering pahami kita lewat pengetahuan teoretis dari ilmuwan barat(?). Kodrat dalam pemahaman wacana seksualitas di Indonesia sendiri diambil dari kosakata bahasa Arab, yang berarti ketentuan. Dalam keseharian orang-orang Indonesia, kodrat ini dimaknai kemudian sebagai karakter alamiah berkenaan dengan gender seseorang, misal seorang laki-laki akan menjadi pencari nafkah keluarga, dan perempuan sebagai pengasuh anak dan pengatur rumah tangga. Jadi menganggap kejantanan sebagai kodrat berarti menerima ketentuan-ketentuan yang melekat

pada diri seseorang tersebut, tanpa perlu mempertanyakan ulang secara kritis sifat kodrati tersebut.

Bagi orang-orang Indonesia, kejantanan dijadikan pembeda untuk menandai laki-laki dari perempuan yang juga dianggap memiliki sifat-sifat kodrati gendernya (lihat: Wieringa, *Sexual Politic in Indonesia*, 2002). Dari situ kita mengenal istilah kodrat pria dan kodrat wanita. Bahwa Laki-laki Indonesia dianggap secara alamiah memiliki sifat-sifat bawaan yakni memiliki wibawa, kasar/tegas, kuat, sakti, jadi imam bagi perempuan, kepala keluarga dsb. Sementara perempuan, atau jika di sini kita lebih akrab dengan sebutan wanita, memiliki sifat lemah lembut, pengatur keuangan, keibuan, *narimo* (pasrah), patuh pada suami/laki-laki yang menjadi manifestasi dari ungkapan 'wanita' itu sendiri, yakni *wani ditata* (bersedia diatur), yang dalam masyarakat Jawa seringkali didekatkan dengan anekdot *manak, masak, macak* (melahirkan, mengurus dapur, bersolek) (Arimbi, 2009: 61). Sifat kodrati dari baik laki-laki maupun perempuan ini mendapatkan legitimasinya dari agama, norma adat istiadat juga negara.

Lantas bagaimana kejantanan memiliki andil menciptakan struktur kekerasan yang terjadi di Indonesia? Kita akan merunut bagaimana perayaan kejantanan ini hadir sebagai mata rantai sejarah. Di masa-masa pra kemerdekaan, masa kolonisasi masih berlangsung atau jauh waktu sebelumnya, ketika kerajaan-kerajaan nusantara masih berdiri, para raja, putra mahkota, punggawa-punggawa kerajaanlah yang melegitimasi kejantanan hingga menjadi sifat kodrati yang menempel pada laki-laki. Dari masa-masa itu kita mengenal istilah wibawa, karisma, dan sifat ksatria. (lih Anderson 1990; Clark 2010) Sifat-sifat itu lantas mendapatkan penguatan. Para lelaki kerajaan sudah semestinya menguasai

kemampuan perang: berkuda, ahli memanah dan menggunakan pedang, ahli bertarung, serta sakti/memiliki ilmu kanuragan. Setiap laki-laki di lingkaran kerajaan merasa wajib memiliki kemampuan perang, karena selain kemampuan tersebut adalah standar nilai bagi kejantanan, secara politis kemampuan perang bisa mereka gunakan untuk mempertahankan kerajaan dari serangan musuh bahkan bisa digunakan untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan lain sebagai wilayah jajahan. Tipikal *warrior, hero* ini mendapatkan penguatan dan terlegitimasi oleh adanya kasta yang bersifat hierarkal dalam hinduisme yang masuk ke nusantara lewat kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit, Sriwijaya, Singasari atau Mataram. (Priangle 2004: 15; Brown 2003). Ada empat hierarki yang dikenal dalam sistem kasta Hindu di Indonesia: Brahmana, ksatria, weisa, dan sudra. Sistem kasta ini yang membagi masyarakat dalam beberapa tingkatan status dan fungsi sosialnya dalam ketatanegaraan.

Kemampuan laki-laki untuk berperang yang menjadi ukuran dan nilai-nilai kejantanan ini lantas menyebar ke lingkungan sosial yang lebih luas di luar kerajaan. Bagaimanapun struktur besar yang terlegitimasi cenderung akan menjadi contoh bagi khalayak. Begitupun dengan kejantanan. Sifat kodrati kejantanan diterima oleh masyarakat luar kerajaan sebagai sebuah anugerah, sebuah hadiah dari alam semesta/gusti. Mereka lantas mempertahankan kodrati kejantanan itu dengan melatih diri mereka untuk bersikap layaknya ksatria. Mereka mendirikan padepokan-padepokan silat, berlatih ilmu beladiri, mengisi tubuh mereka dengan ilmu kanuragan agar menjadi sakti. Menjadi sakti adalah ketika tubuh tidak bisa dilukai dengan senjata, mampu mengalahkan lawan tanding dengan sekali pukul, mempunyai aura kewibawaan hingga lawan bicara

takluk, mengetahui kejadian yang jauh sebelum sebuah peristiwa hadir dsb. Menjadi sakti adalah menjadi seorang laki-laki yang tak terkalahkan. Dari kultur semacam inilah kita lantas mengenal istilah jagoan, atau jawara. Saya berpendapat, jika keraton, atau kerajaan, atau kasultanan yang cenderung masih bersifat eksklusif memiliki model kejantanan dalam bentuk seorang ksatria, kultur jago adalah bentuk 'hero' jalanan/periferal ala nusantara. Jago-jago atau jawara hadir sebagai bentuk kompensasi dari ketidakmampuan rakyat jelata kala itu masuk dalam kasta ksatria, yang merupakan teritori maskulin yang dimiliki kerajaan.

Berlanjut pada masa-masa kolonial, kejantanan hadir dengan substansi yang masih sama. Hanya tujuannya yang agak bergeser. Jika sebelumnya, dengan kejantanan—kemampuan berperang, para laki-laki menggunakannya untuk menunjukkan keberadaan mereka yang harus tampil sebagai penakluk bagi laki-laki lain, wilayah kerajaan lain, selanjutnya di masa kolonial, kejantanan laki-laki pribumi digunakan sebagai politik perlawanan terhadap para penjajah. Di Jawa kita mengenal Pangeran Diponegoro yang mengobarkan perlawanan sengit terhadap Belanda selama bertahun-tahun yang dicatat sebagai Perang Jawa (1825). Dari Aceh kita mengenal Teuku Umar. Dari Maluku ada Kapitan Pattimura. Dari Padang kita mengenal Tuanku Imam Bonjol. Dari Makasar ada Arung Palakka serta Pangeran Hasanudin yang kita kenal dengan sebutan Ayam Jantan dari Timur. (Brown 2003; Drakeley 2005).

Yang menonjol untuk dicatat dari kehadiran para lelaki *hero* tersebut, adalah bahwa keberadaan mereka sebagai seorang laki-laki yang tampil sebagai pemimpin. Baik pemimpin agama (imam dalam arti lebih luas selain

pemimpin ritual ibadah) atau suku/klan atau kelompok besar laki-laki di teritori tertentu. Menurut pandangan saya, yang terjadi di masa-masa awal sepanjang masa kolonial berlangsung adalah, seorang laki-laki yang dianggap *hero* memiliki sekelompok laki-laki lain yang menjadikannya panutan. Kelompok laki-laki dengan satu pahlawan ini lantas merasa mendapatkan musuh/lawan yang perlu diperangi yakni kelompok laki-laki lain—para penjajah. Para penjajah/orang-orang kulit putih/orang-orang barat yang datang ke tanah nusantara dengan membawa superioritas mereka tentu mengusik dan membuat berang laki-laki pribumi yang merasa kejantanan mereka, keberadaan mereka diinjak-injak.

Kolonialisme membawa sepaket agenda kekerasan berupa eksploitasi besar-besaran sumberdaya baik alam dan manusia. Perampasan hasil bumi: gula, kopi, cengkih, kapulaga, bahan-bahan tambang seperti timah, tembaga, dan produk minyak bumi. Itu masih ditambah dengan sistem kolonial memeras sumberdaya manusia pribumi dengan memberlakukan sistem tanam paksa atau pembangunan jalan, rel kereta api atau pembuatan tambang-tambang mineral yang seluruh hasilnya digunakan dan dinikmati oleh pihak penjajah. Jutaan orang mati dalam proyek-proyek milik penjajah baik itu Jepang dan Belanda. Kelaparan, kemiskinan menjadi tak terelakkan ketika semua yang dimiliki penduduk pribumi diperas dan dirampas. (Ricklefs 2001; Anderson 1999; Vltcheck 2012: 16-20)

Dalam kondisi seperti itulah para laki-laki pribumi lantas merasa, bahwa sistem kolonial yang membelenggu mereka, yang membuat mereka menderita, cuma bisa diakhiri dengan jalan kekerasan. Kekerasan yang dari sistem kolonial tersebut bagi pribumi cuma bisa dienyahkan dengan jalan kekerasan juga. Dan itu artinya mereka harus berperang: mengambil kembali kejantanan mereka,

kehormatan mereka yang dirampas oleh pihak lain. Perang yang terjadi dalam rentang waktu lama ini menjadikan kekerasan di negeri ini seakan menjadi akar tradisi.

Dari situlah—dan cuma ada di kepulauan nusantaralah kata “Amok” muncul. Amuk, kata yang makna kamusnya yakni amarah keji, adalah bentuk emosi dimana seseorang mampu melakukan tindakan membabibuta ketika mengekspresikan kemarahannya. Ada sebagian masyarakat yang mengartikan bahwa amuk (*ngamuk*, transformasinya ke dalam kata kerja jika dalam bahasa jawa) adalah kondisi perilaku manusia ketika jiwa iblis menyusup ke dalamnya. Karena dianggap sedang kerasukan jiwa iblis, maka seseorang yang sedang ‘mengamuk’, sanggup melakukan tindakan-tindakan yang brutal di luar kendali, seperti misal penyiksaan, pembantaian atau perusakan. Boelstorff (dalam Gelfer 2014: 79) membuat sebuah deskripsi untuk amuk ini, bahwa amuk adalah “sifat maskulin (personal) dan kadang bisa hadir lewat kemarahan kolektif berwujud kekerasan”.

Runutan sejarah kekerasan seperti yang sudah saya paparkan di ataslah yang kemudian menjadi semacam tradisi yang kita lihat terus-menerus. Dari zaman kemerdekaan, masa pemerintahan Soekarno dengan orde lamanya, berlanjut dengan rezim orde baru di bawah pemerintahan Soeharto sampai era Reformasi dimana Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden, dan digantikan oleh sejumlah nama-nama presiden setelahnya. Pemimpin negara berganti, namun demikian Indonesia tidak mengganti tradisi kekerasannya. Sampai tiap orang nyaris kebas menyaksikan perang berdarah antar-etnis, pemerkosaan massal, pembantaian, pembakaran fasilitas umum, penculikan dan

penghilangan orang, premanisme, sampai aksi teroris baik berupa bom maupun gerakan sparatis.

Seksualitas dan Negara

Dari kajian-kajian gender kita mendapatkan pengetahuan untuk memahami, bahwa *sex* dan gender adalah dua hal yang berbeda. Kita memahami seksualitas sebagai kelamin biologis yang hadir untuk menandai perempuan/laki-laki yang sifatnya ‘terberi’, tak bisa diganggu gugat. Sementara gender sendiri adalah kelamin penanda yang hadir lewat konstruksi sosial dimana perempuan/laki-laki hidup. *Sex* antara perempuan dan laki terbagi dengan sangat jelas: vagina dan penis (meskipun ada kasus seseorang yang memiliki dua kelamin sekaligus). Perbedaan gender menjadi kompleks sebab unsur-unsur pembentuknya juga banyak. Ada sifat berupa ciri-ciri yang menempeli, misal perempuan ditandai dengan sifat lembut, pasif, bertindak dengan perasaan, melankolik dsb, sementara laki-laki memiliki ciri yang bertolak belakang dari yang disandang oleh perempuan: kasar, agresif, berpikir dengan logika, dan macho. Dilihat dari fungsinya, misal fungsi seseorang ketika hadir di dalam masyarakat, bisa kita tandai misal, jika perempuan akan selalu menjadi ibu, perawat anak-anak, pengatur keuangan. Sementara laki-laki adalah seorang bapak, kepala rumah tangga, pelindung, pencari nafkah dsb.

Saya tertarik dengan pertanyaan yang diajukan Katrin Bandel (Bandel: 2016) yang dengan sikap skeptisnya meragukan apakah benar bahwa *sex* merupakan realitas tubuh/biologis yang jadi sedemikian nyata hingga dianggap tak ada sama sekali kaitannya dengan konteks budaya?

Pertanyaan semacam itu membuat saya penasaran dan terpantik untuk ikut berpikir tentang seksualitas seseorang, dalam hal ini laki-laki, apakah benar-benar bisa lepas dari sosiokultural yang melingkupinya. Dalam keseharian masyarakat Indonesia (Khususnya Jawa, karena saya hidup di tengah kultur masyarakat Jawa), seorang bocah laki-laki akan dihardik oleh orang tuanya jika ia ketahuan melakukan aktivitas kencing dengan cara berjongkok. Berkebalikan dengan laki-laki, seorang perempuan mesti berjongkok jika akan melakukan aktivitas buang air seni. Tidakkah ini berarti bahwa cara beraktivitas antara perempuan dan laki-laki dipilah sesuai dengan vagina dan penis mereka? Cara kencing berdiri dan kencing jongkok menjadi *sexual behaviour*. Ketika menginjak remaja, *sex* menjadi penanda fase peralihan mereka. Laki-laki akan disebut akil baliq jika penis mereka sudah disunat. Sementara perempuan mesti mengalami menstruasi pertama lebih dahulu untuk melewati ‘masa kanak’ mereka beralih menuju ke ‘dewasa’. Yang menarik untuk dicatat, sebelum ada UU perkawinan yang mengatur usia, penanda yang digunakan adalah perkara *sex* ini.

Para lelaki dianggap belum menjadi sejatinya laki-laki jika belum menggunakan perkakas seksual mereka untuk bersanggama dengan pasangan pernikahan mereka. Ujian ini masih belum selesai, karena setelah menikah, setelah penis mereka diasumsikan sudah digunakan, mereka harus membuktikan bahwa hasil kerja penis mereka membuahkan hasil. Para lelaki harus memiliki keturunan dari pernikahan mereka, jika tidak, maka mereka akan dicibir sebagai laki-laki yang rusak, laki-laki yang gagal.

Penis yang menjadi penanda seksual bagi laki-laki termanifestasi membawa sifat-sifat yang dianggap sudah menjadi sifat alamiahnya sebagaimana

sebuah senjata. Dan sebagai senjata, penis harus memiliki kualitas maskulinnya yakni ‘tegak’, atau mampu ereksi dan mampu membuahi. Sebagaimana dikatakan oleh Simone Beauvior (2014) yang memberikan pandangan kritisnya terhadap seksualitas, para laki-laki dituntut ereksi sebab penis yang ereksi memiliki fungsi gandanya sebagai senjata: kenikmatan sekaligus kekuasaan. Senjata inilah yang digunakan pada perempuan untuk memenetrasi, untuk memasuki dan membuahi agar mereka tetap dianggap sebagai seorang laki-laki jantan dengan menghasilkan keturunan. Senjata yang digunakan pada laki-laki lain sebagai lambang kekuasaan untuk menaklukkan, berkompetisi, menjajah, dan untuk berperang. Dengan kata lain, *sex*, atau dalam konteks ini adalah penis yang dimiliki laki-laki tidak bisa begitu saja dipisahkan dari gender yang hadir sebagai konstruksi sosial. Perkara seksual mendorong manusia untuk menciptakan ‘aturan-aturan’, sistem sosial untuk mengatur bagaimana aktivitas seksual mesti dijalankan oleh perempuan atau laki-laki. Inilah yang saya maksud bahwa *sex* pada tataran selanjutnya memunculkan konstruksi *gender*. Michel Foucault mengisahkan ulang kondisi orang-orang Yunani dan Romawi kuno dalam memahami seksualitas dan bagaimana mereka membuat sistem-sistem aturan yang mengikat baik hubungan seksual maupun sosial orang-orang di jaman itu. Dari pencatatannya, konsepsi maskulinitas dalam relasi seksual orang-orang Yunani kuno sudah ada. Misalnya, norma yang mengatur bahwa laki-laki yang memiliki kelas status sosial tinggi (baca:bangsawan) diperkenankan melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain, dengan catatan laki-laki yang diajak berhubungan seksual berstatus lebih rendah. Itupun masih dengan catatan

tambahan, bahwa laki-laki dari kasta tinggilah yang memiliki hak untuk mendominasi hubungan seksual.

Dalam tradisi yang primitif dan tribal, norma-norma yang mengatur manusia dalam melakukan aktivitas seksual pun sudah dikenal dan dijalankan. Misalnya, dalam klan suku Kabil di Aljazair (Bordieu: 2001: 19) yang mengatur posisi persenggamaan antara perempuan dan laki-laki. Bahwa ketika melakukan persenggamaan, perempuan diharuskan berada di posisi di bawah untuk telentang dan diam, sementara pihak lelaki di atas bergerak melakukan penetrasi. Pola aktivitas seksual ini yang kemudian diperluas ke aktivitas keseharian (sosial) sebagai identifikasi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat Kabil. Bahwa karena perempuan dianggap luwes ketika di bawah, diam, pasif, maka para perempuan mengambil pekerjaan-pekerjaan produksi berupa bercocok tanam, mengurus anak, atau pekerjaan-pekerjaan yang dianggap memiliki risiko kecil bagi keselamatan mereka. Sementara para laki-laki, yang dianggap aktif, kuat, mengambil pekerjaan yang mereka anggap memiliki risiko berbahaya seperti berburu binatang dan menentukan batas-batas wilayah mereka di antara suku-suku lain.

Sigmund Freud (2001) juga menemukan pada orang-orang suku primitif, suku Aborigin di Australia khususnya. Mereka membuat sistem larangan yang dikenal dengan istilah Tabu/Taboo. Salah satu tindakan tabu paling teratas, selain membunuh binatang/tetumbuhan yang sudah mereka sepakati sebagai totem mereka (representasi nenek moyang, asal-usul) adalah melakukan hubungan seksual dengan pemilik totem sejenis. Pelanggaran akan tabu pada totem ini dapat kita pahami seperti halnya kita memahami pada masyarakat kita sekarang

ketika kita mengenal tabu pada hubungan inses dalam satu keturunan. Dalam penelitian yang lain (yang meneliti pola maskulinitas yang terjadi pada revolusi Perancis) Lynn Hunt (1992), menambahkan, bahwa 'tabu' inilah yang mendorong laki-laki untuk memiliki hasrat, seperti yang ditemukan Freud yakni *Oedipus Complex*. Dimana hasrat itu muncul atas hadirnya penabuan, mitos kutukan-hukuman yang lantas dikoreksi dengan cara melanggarnya. Bahwa kemudian laki-laki menganggap laki-laki lain adalah musuh, dalam konsepsi *Oedipus Complex*, karena laki-laki paling dekat adalah Ayah, maka Ayahlah yang dianggap sebagai musuh nyata yang harus dienyahkan. Sementara Ibu sebagai perempuan paling dekat, dianggap sebagai permasalahan yang hadir sebagai obyek ambivalen. Perempuan dianggap pasif, liyan, lemah, namun di sisi lain ia diperebutkan sebagai bagian syarat dari berkuasa atau tidaknya seorang laki-laki. Hunt lantas menggunakan analogi tabu dalam oedipus complex ini untuk mendeskripsikan pergolakan rakyat Perancis ketika merubuhkan penjara Bastille, mengadili para bangsawan dan menggulingkan kekuasaan raja Perancis. Raja dianggap sebagai figur ayah atau *The Good Father*, sementara tanah air atau bangsa adalah Ibu yang pada akhirnya diperebutkan atas nama keinginan untuk berkuasa.

Peristiwa-peristiwa yang coba saya runutkan di atas terkait dengan seksualitas, membantu kita memahami, bahwa identitas seksual yang sampai sekarang kita sandang, dari lahir sampai nanti tumbuh dewasa dan menua tak akan pernah lepas dari norma-norma yang akan menjadi batas, menjadi pengontrol, bahkan dalam taraf tertentu menjadi pemberi identitas. Di lingkup paling kecil, seksualitas kita diatur oleh norma keluarga. Lingkup lebih besar, ketika kita keluar rumah ada norma masyarakat berbentuk aturan klan, ragam kultur suatu

suku atau adat istiadat dan sebagainya. Dan yang paling besar adalah norma yang hadir lewat campur tangan negara. Negara menjadi institusi pelegalan yang memiliki pengaruh selanjutnya dalam konstruksi identitas, dalam hal ini seksualitas. Dan jika tadi benar apa yang dianalogikan oleh Hunt, bahwa adanya negara adalah ambisi pelembagaan maskulinitas atas kekuasaan, lantas ketika struktur lembaga itu juga ternyata terisi oleh para maskulin, tidakkah norma-norma yang tercipta juga upaya mempertahankan kemaskulinitasan tersebut?. Seperti Hunt, yang menemukan figur-figur maskulin ketika terjadi revolusi Perancis, di Indonesia, kita juga akan menemukan figur-figur ‘Good Father’ itu. Betapa Soekarno dielu-elukan sebagai “Bapak Proklamasi”, karismanya sebagai presiden pertama bangsa ini tak akan mudah kita hapus. Ada lagi Soeharto, yang akan kita kenang sebagai “Bapak Pembangunan”. Dan benar adanya, *oedipus complex* itu juga menghinggapi pemimpin-pemimpin bangsa ini. “Bapak Pembangunan” beranggapan bahwa dialah yang pantas untuk berkuasa, untuk menguasai ibu pertiwi ini, maka “Bapak Proklamasi” pun ia lengserkan lewat jalan kudeta.

Dari para pemimpin yang maskulin inilah negara sebagai institusi pelegalan menciptakan sistem dan struktur yang pada akhirnya berjalan untuk menopang kepentingan-kepentingan maskulin mereka. Soekarno dengan model Demokrasi Terpimpin, sebuah terminologi politik yang digagas Soekarno sebagai pengganti partai dan landasannya terletak dalam “jiwa” dan semangat “gotong royong”, “spiritualistis”, “saling menghormati”, dan “tradisional” (Reeve dalam Suryakusuma 2011: 13). Sementara Soeharto menggunakan gaya pemerintahan militeristiknya untuk menggantikan demokrasi terpimpin. Meski seringkali corak

kepemimpinan keduanya memiliki ciri khas masing-masing, namun menurut Suryakusuma, baik rezim Orde Lama maupun Orde Baru, sebenarnya sama-sama menggunakan simbol untuk mencapai integrasi dan kestabilan nasional. Soekarno menggunakan nasionalis, agama, dan komunis, sementara Soeharto menggunakan nasionalis, agama, dan tentara untuk menyokong pemerintahannya. Intinya, kedua orde ini menggunakan birokrasi sebagai basis politik mereka dan mereka gagal menggunakan mesin administratif yang ada. Kedua orde ini lewat banyak catatan para pengkritik sama-sama melakukan penyalahgunaan kekuasaan, menghasilkan jutawan-jutawan istana serta ketidakstabilan politik, yang pada akhirnya menghasilkan ledakan kekerasan dan kekacauan (Suryakusuma 2011: 14).

Struktur politik dan kebudayaan yang diisi oleh laki-laki dijalankan oleh laki-laki dan berjalan dengan menggunakan perspektif maskulin inilah yang membuat ideologi segregasi seksual di masyarakat terbentuk dan pada akhirnya cenderung menguntungkan laki-laki.